



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, SELASA 26 September 2023



RINGKASAN BERITA HARI INI

Bupati Optimistis Investasi Tembus Rp 7,1 Triliun



KEJAR TARGET: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat menyidik sejumlah pembangunan.

KOTA-Realisasi investasi di Sidoarjo pada triwulan II 2023 mencapai Rp 5,6 triliun atau sebesar 78,8 persen dari target investasi tahun 2023 yaitu Rp 7,179 triliun. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor optimistis investasi di Sidoarjo akan tercapai sesuai target atau bahkan melebihi target. "Tingginya capaian investasi di Sidoarjo pada triwulan kedua ini, membuat kami optimistis dapat mencapai target atau bahkan lebih," ucapnya.



TAK KELIHATAN AIRNYA: Sampah memenuhi Sungai Pelayaran di Desa Tawangsari, Kecamatan Taman, kemarin (25/9).

Sungai Pelayaran Berbau Menyengat-Penuh Sampah

Pekan Depan Dinormalisasi

SIDOARJO - Sungai Pelayaran di Desa Tawangsari, Kecamatan Taman, penuh sampah. Tepasnya, di dekat Pintu Air Desa Tawangsari, Alibur sampah menumpuk, warga tepapar bau busuk yang sangat menyengat. Warga RT 2, RW 11, Desa Tawangsari, Winarno menyebut sudah sekitar satu setengah bulan sungai itu tidak dibersihkan. Imbasnya,

masih dilakukan di Sungai Pelayaran sisi selatan dan barat. "Proses pembesihan masih sampai di Desa Kemangan, Kecamatan Taman. Adanya pengurangan di sana. Prosesnya bertahap nanti ketika yang penuh sampai di Tawangsari," kata Prayit. Menurut dia, pembesihan idealnya tidak hanya dilakukan di satu titik. Namun, menyebarkan hingga di bagian hulu sungai. "Karena itu, pembesihan dilakukan bergiliran dan bertahap di titik-titik yang kotor," kata

penelitian dan pengecekan yang mendalam. Namun, berdasarkan pengamatan sementara, yang terlihat hanya endapan sungai, sampah, dan enceng gondok. Beberapa enceng gondok yang mati dan hanyut di sungai juga membusuk. Prayit mengatakan, sungai tersebut menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Namun, pihaknya mengagapakan tetap ada penanganan dari dimony. Kepala DPMBMSDA Sido-

Bupati Optimistis Meningkatnya Investasi

Mulai Bongkar Halaman Depan Alun-Alun Sidoarjo

SIDOARJO - Revitalisasi sisi timur Alun-Alun Sidoarjo, tepatnya di depan Monumen Jayandaru di sisi Jalan Ahmad Yani, mulai dikerjakan. Pekerja mulai membongkar lantai alun-alun dan memasang pagar keliling. Hingga kemarin (25/9), pagar pembatas dari seng sudah dipasang mengelilingi area kerja. Pagar dipasang di sisi selatan alun-alun hingga depan alun-alun di depan Monumen Jayandaru. Tujuannya, tidak ada warga yang masuk karena banyak material. Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan



DIPERCANTIK: Bagian depan Alun-Alun Sidoarjo mulai direvitalisasi kemarin. Pengerjaan alun-alun sisi timur akan berlangsung hingga Desember.

Sebagian sudah selesai, dibongkar juga dilanjutkan pemasangan rabat sebagai dasar lantai," ucapnya. Setelahnya, pekerja juga mulai memasang tembok

Triwulan II Capai Rp 5,6 T

SIDOARJO - Realisasi investasi di Kabupaten Sidoarjo Triwulan II tahun 2023 mencapai Rp 5,6 triliun atau sebesar 78,8 persen dari target investasi tahun 2023 yaitu Rp 7,179 triliun. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor optimistis investasi di Kabupaten Sidoarjo akan tercapai sesuai target atau bahkan melebihi target. "Tingginya capaian investasi di Sidoarjo pada triwulan kedua ini, membuat kami optimis dapat mencapai target atau bahkan lebih," ucapnya. Angka investasi di Sidoarjo berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 4,8 triliun dengan persentase 85 persen dan dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 838 miliar dengan persentase 15 persen. "Penyumbang terbanyak investasi Sidoarjo yaitu dari PMDN Rudi Setiawan mengkontribusi Rp 1,177 triliun atau 20,8 persen, kedua adalah sektor industri karet dan plastik dengan nominal Rp 867 miliar serta ketiga dari sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menyumbang Rp 624 miliar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Sidoarjo Rudi Setiawan mengatakan, pertumbuhan iklim investasi di Sidoarjo yang on the track (sesuai jalur) atau



Kejar target: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat menyidik sejumlah pembangunan.

mulai dikerjakan. Pekerja mulai membongkar lantai alun-alun dan memasang pagar keliling. Hingga kemarin (25/9), pagar pembatas dari seng sudah dipasang mengelilingi area kerja. Pagar dipasang di sisi selatan alun-alun hingga depan alun-alun di depan Monumen Jayandaru. Tujuannya, tidak ada warga yang masuk karena banyak material. Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan

Kerja Sama Hanya dengan Media e-katalog Beralamat Sidoarjo!

SIDOARJO - Sangat disayangkan, kurangnya pemahaman terkait kerja sama khususnya dengan media yang sudah terverifikasi Dewan Pers baik cetak maupun online. Plt Kasatpol PP Sidoarjo hanya memberikan kerja sama kepada media di Sidoarjo. Plt Kasatpol PP Yani Setyanan dikonfirmasi semula mengatakan, kepada media yang sudah e-katalog alamat Sidoarjo, LPESE kita manfaatkan mendapatkan imendapatkan Rp 4 - Rp 5 juta untuk iklan advertorial dan tahun depan akan saya naikan. Sekarang ini kan saya tahu potensinya, dan semua media kita sarankan ber e-katalog supaya mudah, jadi mengajangi untuk dapat lebih baik.



Staf Satpol PP Moh. Anis S saat dikonfirmasi wartawan Senin (25/9/23)

Yani Dikekspos lain, Andi Mulya Direktur LBI Astranawa mengatakan, imdian yang bersangkutan jelas tidak relevan dalam iklim kebebasan informasi itu hanya alasan saja, dimana untuk mendapatkan iklan maka media tersebut harus berdomisili di Sidoarjo. "Jelas tidak masuk akal, kalau begitu seperti media Jawa Pos, Surya, Kompas jelas tidak mungkin dapat iklan karena kantornya bukan di Sidoarjo. Kita minta bupati mengur pejabat tersebut," ungkap Andi Terpisah Moh Anis S staf Satpol PP yang menanggapi masalah iklan advertorial Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ditemui duta.co Senin (25/9/23) mengatakan, ya betul terkait pengajuan duta sudah kita sampaikan pimpinan, dan sudah di balas ya WhatsApp nya. "Memang betul betahap dan kita nanti akan menginformasikan, karena mohon maaf ada

pergeseran, sebagian yang diarahkan ke media, ungkap Aris. Ditanya kenapa media seperti Duta Masyarakat dan Lensa Indonesia yang nota bene media mainstream dan sudah terverifikasi Dewan Pers tidak mendapatkan kerja sama atau iklan DBHCHT dan banyak media di Sidoarjo yang sudah mendapatkan nya. "Itu yang bisa menjawab pimpinan mas, kita sebagai pelaksana di lapangan," ungkap Aris singkat didampingi staf lain yang enggan menyebutkan namanya. Perlu diketahui, sesuai UU tentang Pers No. 40 tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) menyatakan, setiap warga Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers dan Pasal 9 ayat (2) menyebut perusahaan pers wajib berbadan hukum Indonesia. Diantaranya memiliki akta notaris yang disahkan Kemenkumham, dipinjam wawatan uwa ma memberi perlindungan hukum pada wawatanya. Verifikasi pers sah pers penting untuk menaj standar pelayanan dan sisi konte maupun administrasi jika sudah mendaftar di Dewan Pers. ● 10c

17 Tahun, Belum Ada Bacapres yang Komitmen Siap Bantu Korban Lapindo



Lumpur Lapindo hingga kini masih belum kunjung penyelesaian, pengesahan yang ditentang oleh lapindo panas yang keluar dari area sumur Banjarpanji 1 Berekondisi Kecamatan Pongreh milik Lapindo Brantas Inc.

SIDOARJO - HARIAN BANGSA - Nasib ganti rugi ratusan korban lumpur sampai berbulan-bulan ini, belum beres. Data yang ada, sekitar 214 berkas milik korban lumpur dari mulai milik perorangan dan pengesahan, sampai saat ini belum tuntas penyelesaiannya. Dari ketidakjelasan atau keterlambatan ganti rugi yang belum jelas. Banyak korban lumpur yang berharap ada penanganan dari pemerintah untuk menyelesaikan ini. Terlebih kepada pejabat publik yang melancarkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden di Pemilu 2024 mendatang. M. Nizar, salah satu korban lumpur asal Jember, Kecamatan Pongreh berharap pemerintah bisa lebih peduli saat ini membantu korban lumpur rumah atau aset warga maupun

Bupati Optimistis Investasi Tembus Rp 7,1 Triliun



KEJAR TARGET: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat menyidak sejumlah pembangunan.

KOTA - Realisasi investasi di Sidoarjo pada triwulan II 2023 mencapai Rp 5,6 triliun atau sebesar 78,8 persen dari target investasi tahun 2023 yaitu Rp 7,179 triliun. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor optimistis investasi di Sidoarjo akan tercapai sesuai target atau bahkan melebihi target. "Tingginya capaian investasi di Sidoarjo pada triwulan kedua ini, membuat kami optimistis dapat mencapai target atau bahkan lebih," ucapnya.

Angka investasi di Sidoarjo berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 4,8 triliun dengan persentase 85 persen dan dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 838 miliar dengan persentase 15 persen. "Penyumbang terbanyak investasi Sidoarjo yaitu dari PMDN sisanya berasal dari PMA," ucap Gus Muhdlor sapaan akrab bupati. Realisasi tertinggi investasi pada sektor industri kimia dan far-

masi yaitu Rp 1,177 triliun atau 20,8 persen, kedua adalah sektor industri karet dan plastik dengan nominal Rp 867 miliar serta ketiga dari sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menyumbang Rp 624 miliar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo Rudi Setiawan mengatakan, pertumbuhan iklim investasi di Sidoarjo yang on the track (sesuai jalur) atau

● Ke Halaman 10



Bupati Optimistis...

bahkan over (melebihi) tersebut dampak dari beberapa inovasi kemudahan dalam perizinan serta penanaman modal. "Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan iklim investasi di Sidoarjo adalah tata kelola yang baik di antaranya beberapa inovasi

yang telah kami gagas di dalamnya kemudahan dalam perizinan serta penanaman modal," jelas Rudi. Rudi menjelaskan, DPMPTSP Sidoarjo memfokuskan pada empat kegiatan makro untuk menggenjot iklim investasi di Sidoarjo. Pertama, layanan prime bagi calon investor di Sidoarjo dan yang kedua yakni layanan jemput bola

dengan memudahkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perizinan yang mengacu pada PP Nomor 7 tahun 2021 tentang perpajakan serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yaitu mencetak 100 ribu lapangan kerja baru. "Selain dua inovasi tersebut untuk inovasi ketiga kami ada

inovasi peta potensi dan kajian peluang investasi dalam hal ini kami bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," ucapnya. Rudi juga menyebut inovasi ke empat yang juga ikut berpengaruh pada iklim investasi adalah pengawasan untuk pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman

modal (LKPM) tepat waktu. "Untuk pengawasan LKPM ini kami melakukan pendampingan by group WhatsApp, bersurat kepada pelaku usaha, coaching klinik (klinik pelatihan) dalam ruang kelas sesuai kategori usaha, serta kami agendakan untuk turun ke bawah bagi pelaku usaha yang belum taat untuk kami bimbing," ucapnya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



TUNGGU KEBIJAKAN: Deretan stan yang disewakan di GOR Sidoarjo.

Perlu Evaluasi Retribusi dan Penyelesaian Tunggakan Stan GOR

KOTA-Untuk meningkatkan pendapatan daerah, legislatif menilai perlu dilakukan sejumlah langkah. Salah satunya melalui evaluasi retribusi dan penyelesaian tunggakan.

Juru bicara fraksi Golkar M Thoriqul Huda mengungkapkan kekhawatiran terkait pendapatan dari sewa stan di Gedung Olahraga (GOR) Sidoarjo. Hal itu terkait dengan tung-

gakan retribusi stan yang hingga saat ini belum diselesaikan dengan baik oleh pihak penyewa.

Dalam keterangannya, Thoriqul Huda menyatakan bahwa pihaknya merasa perlu untuk mengevaluasi retribusi yang dikenakan kepada penyewa stan di GOR. Agar retribusi yang diterima sesuai dengan ketentuan

● Ke Halaman 10



Perlu Evaluasi Retribusi...

yang berlaku dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pengelolaan GOR.

Pihaknya berharap agar regulasi terkait retribusi dan perjanjian sewa stan di GOR Sidoarjo dievaluasi kembali dan ditertibkan.

"Selain itu, pihak penyewa juga perlu diberikan pemahaman yang jelas

terkait regulasi dan perjanjian sewa agar tercipta kerjasama yang lebih baik antara pengelola GOR dan penyewa stan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo Djoko Supriyadi mengungkapkan, saat ini terdapat tunggakan retribusi stan di GOR Sidoarjo yang mencapai Rp 2,3 miliar.

Meskipun ada tunggakan tersebut,

sejumlah penyewa stan masih terus beroperasi.

Setiap bulan, pihaknya datang langsung untuk menagih retribusi bulanan kepada penyewa stan. Jumlahnya rata-rata sekitar Rp 1,1 juta per bulan. Namun, hingga saat ini, penyewa

masih berbelit dan enggan membayar. "Mereka memberikan berbagai alasan untuk tidak membayar tunggakan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Djoko menjelaskan bahwa terdapat 47 stan yang masih beroperasi di lingkungan GOR Sido-

arjo. Hingga saat ini pihaknya menunggu kebijakan dari Bupati Sidoarjo terkait upaya penyelesaian yang cepat dan tepat. Sehingga GOR dapat terus berfungsi dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. (mis/vga)



Bupati Optimistis Meningkatnya Investasi

Triwulan II Capai Rp 5,6 T

SIDOARJO - Realisasi Investasi di Kabupaten Sidoarjo Triwulan II tahun 2023 mencapai Rp5,6 triliun atau sebesar 78,8 persen dari target investasi tahun 2023 yaitu Rp7,179 triliun.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali optimis investasi di Kabupaten Sidoarjo akan tercapai sesuai target atau bahkan melebihi target.

"Tingginya capaian investasi di Sidoarjo pada triwulan kedua ini, membuat kami optimis dapat mencapai target atau bahkan lebih," ucapnya.

Angka investasi di Sidoarjo berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp4,8 triliun dengan persentase 85 persen dan dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 838 miliar dengan persentase 15 persen.

Penyumbang terbanyak investasi Sidoarjo yaitu dari PMDN sebesar Rp4,8 triliun atau 85 persen, sisanya berasal dari PMA," ucap Gus Muhdlor sapaan akrab Bupati Sidoarjo Senin(25/9/23)

Realisasi tertinggi investasi pada sektor industri kimia dan farmasi yaitu Rp1,177 triliun atau 20,8 persen, kedua adalah sektor industri

karet dan plastik dengan nominal Rp. 867 miliar serta ketiga dari sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menyumbang Rp. 624 miliar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, Rudi Setiawan mengatakan pertumbuhan iklim investasi di Sidoarjo yang on the track (sesuai jalur) atau bahkan over (melebihi) tersebut dampak dari beberapa inovasi kemudahan dalam perizinan serta penanaman modal.

"Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan iklim investasi di Sidoarjo adalah tata kelola yang baik diantaranya beberapa inovasi yang telah kami gagas di dalamnya kemudahan dalam perizinan serta penanaman modal," jelas Rudi saat ditemui di kantornya.

Rudi menjelaskan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo memfokuskan pada empat kegiatan makro untuk menggenjot iklim investasi di Kabupaten Sidoarjo.

Pertama, layanan prime bagi calon investor di Sidoarjo dan yang kedua yakni layanan jemput bola dengan memudahkan pelaku Usaha



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dalam suatu acara

Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perizinan yang mengacu pada PP Nomor 7 tahun 2021 tentang perpajakan serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yaitu mencetak 100 ribu lapangan kerja baru.

"Selain dua inovasi tersebut untuk inovasi ketiga kami ada inovasi peta potensi dan kajian

peluang investasi dalam hal ini kami bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," ucapnya.

Rudi juga menyebut inovasi keempat yang juga ikut berpengaruh pada iklim investasi adalah pengawasan untuk pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) tepat

waktu.

"Untuk pengawasan LKPM ini kami melakukan pendampingan by group WhatsApp, bersurat kepada pelaku usaha, coaching klinik (klinik pelatihan) dalam ruang kelas sesuai kategori usaha, serta kami agenda-kan untuk turun kebawah bagi pelaku usaha yang belum taat untuk kami bimbing," ucapnya. • Loe



TAK KELIHATAN AIRNYA: Sampah memenuhi Sungai Pelayaran di Desa Tawangsari, Kecamatan Taman, kemarin (25/9).

DIMAS MULLANA / JAWA POS

Sungai Pelayaran Berbau Menyengat-Penuh Sampah

Pekan Depan Dinormalisasi

SIDOARJO - Sungai Pelayaran di Desa Tawangsari, Kecamatan Taman, penuh sampah. Tepatnya, di dekat pintu air Desa Tawangsari. Akibat sampah menumpuk, warga terpapar bau busuk yang sangat menyengat.

Warga RT 2, RW 11, Desa Tawangsari, Winarno menyebut sudah sekitar satu setengah bulan sungai itu tidak dibersihkan. Imbasnya, sampah yang bercampur lumpur menumpuk di titik dekat pintu air tersebut. "Baunya menyengat. Kami takut itu limbah. Harapannya

bisa segera dibersihkan," kata Winarno.

"Ini juga kan mau musim hujan. Perlu dikeruk agar nanti aliran air tidak sampai meluber. Sebab, samping sungai ini berbatasan langsung dengan jalan dan halaman rumah warga," lanjutnya.

Kabid Ketersediaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUB-MSDA) Sidoarjo Suprayitno mengakui, sungai tersebut memang kerap dipenuhi sampah dan enceng gondok.

Dia menyebut kondisi itu bukannya dibiarkan. Rencananya, sungai tersebut dibersihkan, tapi secara bertahap. Saat ini pembersihan

masih dilakukan di Sungai Pelayaran sisi selatan dan barat. "Proses pembersihan masih sampai di Desa Krembangan, Kecamatan Taman. Ada pengerukan di sana. Prosesnya bertahap nanti ke titik yang penuh sampah di Tawangsari," kata Prayit.

Menurut dia, pembersihan idealnya tidak hanya dilakukan di satu titik. Namun, menyeluruh hingga di bagian hulu sungai. "Karena itu, pembersihan dilakukan bergiliran dan bertahap di titik-titik yang kotor," katanya. Apakah ada indikasi sebagai tempat pembuangan limbah? Prayit menyatakan belum bisa memastikan hal tersebut. Sebab, harus ada

penelitian dan pengecekan yang mendalam.

Namun, berdasar pengamatan sementara, yang terlihat hanya endapan sungai, sampah, dan enceng gondok. Beberapa enceng gondok yang mati dan hanyut di sungai juga membusuk. Prayit mengatakan, sungai tersebut menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Namun, pihaknya mengupayakan tetap ada penanganan dari dinasnyanya.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengungkapkan, upaya normalisasi di titik tersebut mulai dilaksanakan minggu

depan. Normalisasi dilakukan sepanjang 2 kilometer. "Ada pengangkatan sampah dan sedimen sungai. Nanti sampah dibuang di *spoil bank* yang sudah di siapkan di tiap desa," ujarnya.

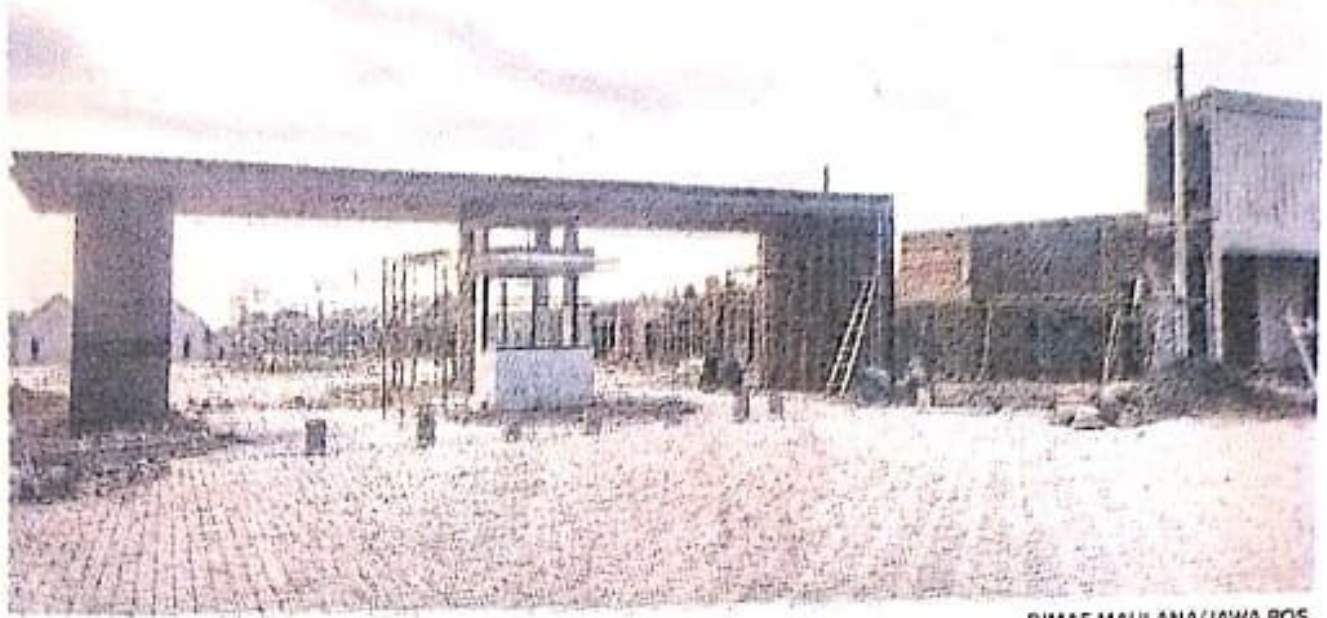
Dwi menuturkan, penanganan sampah dilakukan sejak hilir sungai. Artinya, desa sekitarnya seperti Krembangan dan Tanjungsari juga dinormalisasi. "Normalisasi dilakukan dari dinas kami, lalu Dinas PU Sumber Daya Air Jawa Timur dan Jasa Tirta," katanya. Terkait bau yang menyengat, kemarin pihaknya meninjau langsung ke lokasi untuk memastikan lebih lanjut. Namun, prediksinya hanya ada sampah dan sedimen biasa. (uzi/c7/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIMAS MAULANA/JAWA POS

TERUS TUMBUH: Pembangunan perumahan baru di kawasan Sukodono, Sidoarjo, kemarin. Perumahan merupakan salah satu sektor yang tren investasinya positif.

Realisasi Investasi Tembus Rp 5,6 T

Tren Positif Industri Kimia dan Farmasi

SIDOARJO – Realisasi investasi di Sidoarjo sudah tembus Rp 5,6 triliun atau 78,8 persen pada triwulan kedua ini. Targetnya, akhir 2023 angka Rp 7,179 triliun tercapai. Ada tren positif investasi sektor industri kimia dan farmasi, disusul sektor industri karet dan plastik

dustri karet dan plastik dengan nilai Rp 867 miliar. Ketiga sektor perumahan, termasuk kawasan industri dan perkantoran, dengan nilai Rp 624 miliar.

Ada dua sektor yang sampai saat ini belum masuk investasinya. Yakni, sektor pertambangan dan sektor tanaman pangan serta perkebunan dan peternakan. Artinya, nilai investasi dua sektor tersebut masih nol. Namun,

sektor tersebut trennya positif," ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo Rudi Setiawan. Tertinggi dalam pencatatan triwulan kedua ini adalah sektor industri kimia dan farmasi dengan nilai investasi Rp 1,177 triliun.

Sektor kedua adalah in-

tensi besar di Sidoarjo.

Rudi mengungkapkan, investasi yang masuk Sidoarjo paling banyak adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN). Nilainya Rp 4,8 triliun atau persentasenya mencapai 85 persen. Sisanya dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 838 miliar dengan persentase 15 persen. (uzi/c17/any)

Jawa Pos

DELT  PUNYA

Stasiun Porong Tetap Eksis meski Terdampak Lumpur

SIDOARJO – Meski masuk area yang terdampak semburan lumpur pada 2006, Stasiun Porong menjadi salah satu pusat aktivitas yang masih eksis hingga kini.

Stasiun Porong merupakan buah proyek masa Belanda untuk jalur kereta menuju Pulau Jawa bagian timur. Dari arsip Belanda, pegiat sejarah Sidoarjo Masa Kuno dr Sudi Harjanto mengungkapkan bahwa stasiun dengan kode PR itu dibangun pada 1876.

Sudi mengatakan bahwa dulu Stasiun Porong hanya stasiun kecil. Bahkan, stasiun tersebut tidak diresmikan langsung oleh pemerintah

Hindia Belanda saat itu. "Peresmianya di Surabaya waktu itu. Pejabat datang saat mencoba jalur ke arah Bangil," jelasnya. Stasiun Porong hanya dijadikan tempat transit sementara.

Menurut Sudi, Porong masih kalah ramai dengan Stasiun Bangil dan Sidoarjo. "Tapi, perannya cukup vital. Terlebih, pada masa itu, jalur yang melintasi Porong juga digunakan untuk pengangkutan komoditas tebu ke Indonesia Timur," tuturnya.

Nama stasiun yang terletak di Desa Mindi itu mulai naik ketika ada semburan lumpur pada 2006. Bersama Tanggulangin, nama Stasiun Porong menjadi *trending* karena masih aktif selepas adanya semburan lumpur. "Kini masih eksis dibanding beberapa stasiun lain yang mati di jalur arah timur Pulau Jawa," jelasnya. (eza/c7/any)



AHMADI BEZA/ JAWA POS

MASIH BERFUNGSI: Jalur rel kereta api di Stasiun Porong.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Regulasi Pit Kasatpol PP

Kerja Sama Hanya dengan Media e-katalog Beralamat Sidoarjo!

SIDOARJO - Sangat disayangkan, kurangnya pemahaman terkait kerja sama khususnya dengan media yang sudah terverifikasi Dewan Pers baik cetak maupun online, Pit Kasatpol PP Sidoarjo hanya memberikan kerja sama kepada media yang e-katalog alamat Sidoarjo kepada media dikarenakan banyaknya media di Sidoarjo.

Pit. Kasatpol PP Yani Setyawan dikonfirmasi semula mengatakan, kepada media yang sudah e-katalog alamat Sidoarjo, LPSE kita mainkan (mendapatkan)mendapatkan Rp 4 - Rp 5 juta untuk iklan advertorial dan tahun depan akan saya naikkan.

Sekarang ini kan saya tahu potensinya, dan semua media kita sarankan ber e-katalog supaya mudah, jadi mengajari untuk dapat lebih baik.

Dan bagi media yang belum ber e-katalog ada kebijakan untuk membatasi dengan media yang ber e-katalog Sidoarjo. Untuk sampai saat ini belum terealisasi kerja sama tersebut Yani menjawab

"Nggeh diatur secara bertahap oleh pelaksana kegiatan,"pungkas



Staf Satpol PP Moh. Aris S saat dikonfirmasi wartawan Senin (25/9/23)

Yani

Dikesempatan lain, Andi Mulya Direktur LBH Astranawa mengatakan, tindakan yang bersangkutan jelas tidak relevan dalam iklim keterbukaan informasi, itu hanya alasan saja, dimana untuk mendapatkan iklan maka media tersebut harus berdomisili di Sidoarjo.

"Jelas tidak masuk akal, kalau begitu seperti media Jawa Pos, Surya, Kompas jelas tidak mungkin dapat iklan karena kantornya bukan di Sidoarjo, Kita minta bupati menegur pejabat tersebut.!",pungkas Andi

Terpisah Moh Aris S staf Satpol PP yang menangani masalah iklan atau Advertorial Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ditemui duta.co Senin (25/9/23) mengatakan, ya betul terkait pengajuan duta sudah kita sampaikan pimpinan, dan sudah di balas ya WhatsApp nya.

"Memang betul bertahap dan kita nanti akan menginformasikan, karena mohon maaf ada

pergeseran, sebagian yang diarahkan ke media,"ungkap Aris.

Ditanya kenapa media seperti Duta Masyarakat dan Lensa Indonesia yang nota bene media mainstream dan sudah terverifikasi Dewan Pers tidak mendapatkan kerja sama atau iklan DBHCHT dan banyak media di Sidoarjo yang sudah mendapatkan nya.

"Itu yang bisa menjawab pimpinan mas, kita sebagai pelaksana di lapangan,"ungkap Aris singkat didampingi staf lain yang enggan menyebutkan namanya.

Perlu diketahui, sesuai UU tentang Pers No.40 tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) menyatakan, setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan Pers dan Pasal 9 ayat (2) menyebut perusahaan pers wajib berbadan hukum Indonesia.

Diantaranya memiliki akte notaris yang disahkan Kemenkumham, dipimpin wartawan utama memberi perlindungan hukum pada wartawannya. Verifikasi perusahaan pers penting untuk menjaga standar pelayanan dari sisi konten maupun administrasi jika sudah mendaftar di Dewan Pers. • **Loe**

DUTA

Jembatan Semampir Kelar Lebih Cepat dari Target

SIDOARJO (BM) - Pembangunan jembatan baru di Semampir Sidoarjo hampir selesai. Kondisi jembatan sudah tersambung. Kini petugas sedang menuntaskan permukaan jembatan.

Dalam minggu ini, jembatan tersebut ditarget selesai 32 persen. Namun, ternyata realisasinya lebih cepat daripada target. Saat ini jembatan tersebut sudah terbangun 86 persen. Artinya, jembatan penghubung Desa Semampir dengan Desa Tambak Sawah itu terbangun nyaris tiga kali lipat dari target.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, pihaknya mengupayakan percepatan karena selama pembangunan jembatan tersebut, Jalan

Kyai Husein, tepat di lokasi jembatan dibangun, harus ditutup total.

Pemkab Sidoarjo tidak membangun jembatan sementara karena di sekitar cukup banyak jalan alternatif. Pengendara bisa melewati jalan utama seperti Jalan Raya Bandara Juanda dan sekitarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Saptono mengatakan, pekerja sudah menuntaskan pembangunan struktur jembatan dengan lebar 5,7 meter dan panjang 9 meter tersebut.

"Pekerjaan inti sudah selesai, struktur sudah terbangun. Pengecoran

lantai di permukaan jembatan juga sudah," kata Dwi. Railing atau pagar jembatan juga sudah terpasang.

Dwi menyebutkan, saat ini petugas sedang mengerjakan oprit atau turunan jembatan di tiap ujung jembatan. "Sekaligus finishing-nya. Sekalian menunggu kematangan beton permukaan jembatan," katanya. Setelah itu, jembatan sudah bisa dilalui.

Meskipun ditarget selesai akhir Desember, pihaknya akan membuka jembatan tersebut jika nanti bisa selesai lebih cepat daripada target. Dengan begitu, Jalan Kyai Husein tidak lagi ditutup total. "November semoga bisa dilewati," ujarnya. (udi)



BM/ST

JEMBATAN SEMAMPIR: Pekerja menyelesaikan pembangunan jembatan di Semampir, Sedati, Jumat (22/9). Pembangunan jembatan tersebut lebih cepat dari target.

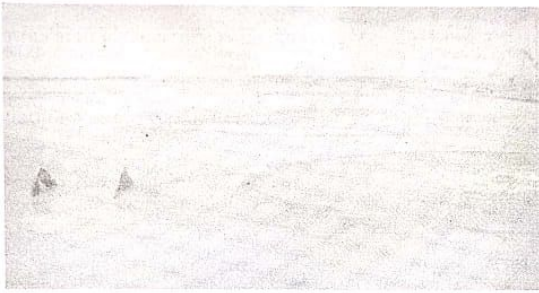
17 Tahun, Belum Ada Bacapres yang Komitmen Siap Bantu Korban Lapindo

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Nasib ganti rugi ratusan korban lumpur sampai berjalan 17 tahun ini, belum beres. Data yang ada, sekitar 214 berkas milik korban lumpur dari mulai milik perorangan dan pengusaha, sampai saat ini belum tuntas pelunasannya.

Dari ketidakjelasan atau terkatung-katungnya ganti rugi yang belum jelas. Banyak korban lumpur yang berharap ada penanganan dari pemerintah untuk menyelesaikan itu. Terlebih kepada pejabat publik yang mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden di Pemilu 2024 mendatang.

M Nizar, salah satu korban lumpur asal Jatirejo, Kecamatan Porong berharap pemerintah pusat serius menangani ganti rugi rumah atau aset warga maupun



Lumpur Lapindo hingga kini masih belum berujung penyelesaian.

pengusaha yang ditenggelamkan oleh lumpur panas yang keluar dari area sumur Banjarpanji 1 Renokenongo Kecamatan Porong milik Lapindo Brantas Inc.

"Warga yang tergabung di kelompok saya, ada sebanyak 46 warga. Ganti rugi yang diberikan oleh Lapindo saat itu hanya aset bangunan rumah saja, aset

tanahnya belum diberikan ganti rugi. Jadi 46 warga itu mendapatkan ganti rugi bangunan saja dengan nilai Rp 1,5 juta per meter," katanya, Senin (25/9).

Dia menjelaskan, perjanjian antara PT. Minarak Lapindo Jaya dengan warga (kelompok 46 warga Jatirejo) memang diselesaikan di luar skema yang ada.

Ganti rugi yang diberikan adalah bangunan rumahnya saja. "Sedangkan aset tanah dari 46 warga itu tidak dijual sampai ada kejelasan terkait nilai ekonomi dari tanah tersebut," ungkapnya.

Selain berharap kepada pemerintah, pria yang akrab disapa Ipung itu juga berharap ada keikutsertaan pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan juga Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) untuk ikut peduli dengan nasib terkatung-katungnya ganti rugi korban lumpur ini.

"Saya ingin Gubernur Jatim Bu Khofifah dan juga Gus Muhdlor selaku bupati Sidoarjo ikut cawe-cawe mendorong atau lainnya kepada pemerintah pusat agar masalah ganti rugi ini segera terselesaikan," imbuhnya.

Selain berharap kepada pemerintah, dia juga belum melihat dan mendengar ada capres maupun cawapres yang peduli menemui permasalahan yang dialami korban atau calon yang komitmen akan menyelesaikan masalah korban lumpur jika terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Memang saat ini masih tahapan masih bakal calon, belum resmi ditetapkan sebagai calon resmi di Pilpres 2024 mendatang. Tapi kalau di masa bakal calon sudah mau mendengar dan peduli terhadap nasib korban lumpur Lapindo, saya kira juga bagus," jelasnya. Tentunya juga harus dibarengi komitmen yang jelas kalau terpilih mendatang, jika sampai dalam masa pemerintahan Jokowi kedua ini, penanganan masalah ganti rugi korban lumpur belum beres. (cat/rd)

HARIAN
BANGSA
Koran Warga, Jatim

OPD

36 Peserta Seleksi JPT Pratama Jalani Tes Wawancara Teknis

KOTA-Sebanyak 36 peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjalani tes wawancara teknis. Tahapan seleksi tersebut berlangsung di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Sidoarjo, Senin (25/9).

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Mahmud mengatakan, tes wawancara teknis tersebut meliputi kompetensi manajerial. Tahapan tersebut setelah mereka dinyatakan lolos administrasi.

Selanjutnya, peserta yang lolos akan mengikuti tahapan paparan dan wawancara.

Diakuinya, seleksi JPT Pratama menarik perhatian sejumlah pegawai yang berminat untuk mengemban berbagai jabatan penting dalam pemerintahan daerah. "Jumlah pendaftar untuk masing-masing jabatan beragam," katanya.

Asisten perekonomian dan pembangunan ada 5 peserta, Kepala BKD 4 orang, Kepala Satpol PP 3 orang, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 9 orang, serta Kepala Disporapar 15 orang

Selanjutnya, Mahmud menyampaikan bahwa pejabat pembina kepegawaian di Kabupaten Sidoarjo akan menetapkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terpilih pada 29 September mendatang.

Seleksi JPT Pratama diharapkan

capat menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berkualitas untuk mengemban tugas-tugas penting dalam mengelola pemerintahan di Sidoarjo. Pemkab pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penempatan pejabat yang tepat dan berkompeten. (nis/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ajak Pelajar Jauhi Pengaruh Bahaya Gangster

KOTA-Upaya menanamkan nilai-nilai cinta Tanah Air terutama pada generasi muda di tengah era digitalisasi sangatlah diperlukan. Hal itulah yang ingin dipupuk Kapolsek Sidoarjo Kota AKP I Gusti AG Ananta, saat menjadi inspektur upacara bendera di SMPN 3 Sidoarjo, Senin (25/9). “Kami ingin mengajak siswa rasa cinta Tanah Air dengan tidak mudah terpengaruh derasnya informasi dan pengaruh kenakalan remaja,” katanya.

Dia menambahkan, para siswa harus terus menambah wawasan dengan belajar. Hal itu merupakan bentuk sebagai generasi muda

dalam mencintai Tanah Air. Salah satunya tidak mudah terpengaruh pergaulan yang tidak tepat.

“Hindari kenakalan remaja, seperti jauhi pengaruh bahaya narkoba, gengster serta pergaulan bebas. Maka dari itu adik-adik pelajar kamiimbau untuk taat pada orang tua, guru dan teruslah giat belajar,” pesannya. **(dik/vga)**